



Kemantapan Jalan di Sulsel Turun 4 Persen



NURHADI/FAJAR

BUTUH TAMBAL. Kondisi di salah satu ruas jalan provinsi tepatnya di Jalan Sultan Alauddin Makassar. Pengalihan anggaran dua tahun terakhir ini membuat sejumlah infrastruktur tidak tertangani.

Kemantapan Jalan di Sulsel Turun 4 Persen

MAKASSAR, FAJAR—Rekonstruksi jalan di Sulsel mandek selama dua tahun. Kapasitas fiskal daerah menjadi hambatan. Kondisi kemantapan ruas jalan provinsi di Sulsel pada tahun 2023 mencapai 75 persen. Namun, pada tahun 2025 ini tersisa 71 persen.

Itu artinya ada penurunan berkisar 4 persen. Hal ini disebabkan oleh prioritas penganggaran yang beralih pada dua tahun anggaran sebelumnya. Kemudian, semakin dihambat oleh kebijakan efisiensi anggaran.

Infrastruktur jalan sebagai layanan dasar bagi masyarakat terus tergerus. Mobilitas antar daerah tidak berhenti. Namun, proyek pening-

katan jalan tidak progresif. Akibatnya, kualitas jalan semakin menurun.

Masuknya Gubernur Sulaiman membawa angin segar baru. Prioritasnya terhadap pembangunan infrastruktur telah ia tunjukkan di periode pertamanya.

Pada apel perdananya di Rujab Gubernur Sulsel, Senin, 3 Maret lalu, ia langsung menegaskan bahwa ada Mandatory Spending bagi Pemprov Sulsel yang ditarget per 2027.

Selama ini, hanya 20 persen dari APBD yang teralokasi untuk infrastruktur. Sedangkan Mandatory Spending di angka 40 persen.

Andi Sudirman Sulaiman

mengatakan, perbaikan jalan perlu jadi prioritas. Saat ini, ada penurunan kemantapan jalan provinsi. Secara umum, panjang ruas jalan provinsi mencapai 2014,23 km. Dari angka itu, kondisi kemantapan jalan provinsi di Sulawesi Selatan di angka 71 persen.

Kondisi jalan dalam keadaan baik mencapai 948,7 km, kondisi sedang 569,5 km, rusak ringan 176,6 km, dan rusak berat 319,3 km. Saat ini, masih ada sekitar 500 kilometer jalan provinsi yang rusak di Sulsel.

"Turun kemantapan jalan dari 75 jadi 71 persen. Pantasan kalau saya di jalan selalu ditanya, pak, jalan (rusak).

Perasaan dulu masih agak mendingan sedikit," kata Andi Sudirman.

Sekprov Sulsel Jufri Rahman menerangkan, saat ini pemprov tengah menggodok realokasi ulang APBD. Sektor infrastruktur bakal jadi salah satu prioritas. Pemprov telah memangkas anggaran dinas 50 persen dan anggaran makan minum Rp87 miliar.

"Pak gubernur ambil kebijakan dari pada uang ini digunakan untuk hal yang tidak jelas. Kan begini beberapa kemudian perencanaan itu konvensional seperti di masa-masa lalu. Pak Gubernur tidak mau. Beliau maunya semua anggaran itu terarah," ulas Jufri. (uca/lin)